



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;



- d. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- f. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- i. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
- t. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 23);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Umum
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

4.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ataudimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

4.2.3 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).



4.2.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.6 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;



- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.



BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Umum

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Pemerintah Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;



- 2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
- 3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2017;
- 4. Neraca SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2017, yang kemudian dikompilasi menjadi Neraca Daerah Gabungan;
- 5. Neraca Gabungan dari masing-masing SKPD;
- 6. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Dinas Perhubungan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD Yang Sah. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

1	Pendapatan Asli Daerah	320.000.000,00	170.194.500,00	53,19%	89.262.500,00
2	Lain - lain PAD Yang Sah	10.000.000,00	3.850.000,00	38,50%	-
	Jumlah	330.000.000,00	174.044.500,00	52,74%	89.262.500,00

Realisasi pendapatan daerah per kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan untuk periode TA.2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut :



No	Pendapatan Daerah:	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Hasil Retribusi Daerah	320.000.000,00	170.194.500,00	53,19%	89.262.500,00
2	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	3.850.000,00	38,50%	-
		330.000.000,00	174.044.500,00	52,74%	89.262.500,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA.2017 sebesar Rp.330.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.174.044.500,00.

Sedangkan untuk realisasi TA.2016 sebesar Rp.89.262.500,00 terdapat kenaikan pada realisasi tahun 2017. .

5. 2. 2 Belanja

Belanja Dinas Perhubungan pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan TA.2017 serta Realisasi TA.2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	6.621.537.269,00	5.949.272.108,00	89,85	8.844.445.870,00
2	Belanja Modal	5.717.450.000,00	5.587.022.500,00	97,72	5.231.377.985,00
	Jumlah	12.338.987.269,00	11.536.294.608,00	93,49	14.075.823.855,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Dinas Perhubungan TA.2017 sebesar Rp. 12.338.987.269,14 terealisasi sebesar Rp.11.536.294.608,00 atau 93,49 %. Dibandingkan realisasi TA.2016 Rp. 14.075.823.855,00 yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp. 2.539.529.247,00. Realisasi Belanja Dinas Perhubungan TA.2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Perhubungan dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 dan TA.2016 sebesar Rp. 6.621.537.269,14 terealisasi sebesar Rp. 5.949.272.108,00 atau 88,64 %, dan jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.8.844.445.870,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 2.895.173.762,00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.349.739.213,14	3.796.424.478,00	87,28	2.784.712.982,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.271.798.056,00	2.152.847.630,00	94,76	5.872.432.888,00
3	Belanja Hibah	-	-	-	187.300.000,00
	Jumlah	6.621.537.269,14	5.949.272.108,00	89,85	8.844.445.870,00



Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.188.449.500,00	1.000.776.700,00	84,21	1.249.905.360,00
Tunjangan Keluarga	124.039.258,00	81.389.516,00	65,62	103.758.182,00
Tunngangan Jabatan	165.165.000,00	148.425.000,00	89,86	181.985.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	23.400.000,00	19.260.000,00	82,31	23.575.000,00
Tunjangan Beras	84.163.000,00	53.068.500,00	63,05	68.581.740,00
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	33.137.594,00	1.751.394,00	5,29	13.971.763,00
Pembulatan Gaji	25.861,14	13.368,00	51,69	19.937,00
Tunjangan Lauk Pauk	228.624.000,00	149.298.000,00	65,30	214.068.000,00
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	758.400.000,00	649.000.000,00	85,57	816.910.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.400.000,00	110.850.000,00	82,48	-
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	1.392.000.000,00	1.386.770.000,00	99,62	
Honorarium PNS Lainnya	187.935.000,00	165.885.000,00	88,27	-
Uang Lembur PNS	30.000.000,00	29.937.000,00	99,79	111.938.000,00
Jumlah	4.349.739.213,14	3.796.424.478,00	87,28	2.784.712.982,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.349.739.213,14 terealisasi sebesar Rp. 3.796.424.478,00 atau 87,28%. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 2.784.712.982,00 mengalami kenaikan.



2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan Habis Pakai	383.855.000,00	378.592.909,00	98,63	551.925.300,00
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-	17.200.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	229.100.000,00	197.605.153,00	86,25	180.340.948,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.000.000,00	115.963.977,00	89,89	332.113.966,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.100.000,00	91.648.625,00	93,42	142.335.900,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	75.703.056,00	75.480.500,00	99,71	135.019.000,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	173.349.000,00
8	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	43.500.000,00
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	73.563.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	1.153.040.000,00	1.146.526.466,00	-	2.004.225.774,00
11	Belanja Pemeliharaan	73.000.000,00	17.950.000,00	24,59	143.335.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	-
13	Belanja Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	55.000.000,00	54.200.000,00		166.985.000,00
14	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	285.120.000,00
15	Belanja Honorarium Non PNS	-			1.623.420.000,00
	Jumlah	2.271.798.056,00	2.152.967.630,00	94,77	5.872.432.888,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.271.798.056,00 realisasi sebesar Rp.2.152.847630,00 atau 94,77 %. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 5.872.432.888,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 3.719.465.258,00

3. Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi belanja Hibah TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	187.300.000,00
		-	-	-	-

2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Perhubungan meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :



No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tanah	-	-		-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	1.038.635.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.672.450.000,00	5.562.022.500,00	98,05	4.192.742.985,00
	Jumlah	5.717.450.000,00	5.587.022.500,00	97,72	5.231.377.985,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2017 sebesar Rp. 5.717.450.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.587.022.500,00 atau 97,72%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.5.231.337.985,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 355.644.515,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan Komunikasi TA.2017 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Appliance)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	185.343.000,00
2	Pengadaan Alat Bantu	-	-	-	44.920.000,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	454.296.000,00
4	Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	185.686.000,00
5	Pengadaan Komputer	-	-	-	119.110.000,00
6	Pengadaan alat Komunikasi	-	-	-	49.280.000,00
7	Pengadaan Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
8	Pengadaan Electric Generating Set	20.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	1.038.635.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar Rp.45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 atau 55,56 %.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan TA.2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	44.700.000,00	89,40	3.682.322.985,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	4.713.650.000,00	4.610.022.500,00	97,80	-
3	Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	823.800.000,00	823.800.000,00	100,00	-
4	Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	85.000.000,00	83.500.000,00	98,24	-
	Jumlah	5.672.450.000,00	5.562.022.500,00	98,05	3.682.322.985,00



Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA.2017 sebesar Rp.5.672.450.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.562.022.500,00 atau 98,05 %.

5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan TA.2017 sebesar Rp. 174.044.500,00 dan Belanja Dinas Perhubungan TA.2017 Rp.12.338.987.269,14 dihasilkan sebesar (Rp.11.536.294.608,00). dibandingkan pada TA.2016 sebesar (Rp.13.986.561.355,00)

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan - LRA	330.000.000,00	174.044.500,00	52,74	89.262.500,00
2	Realisasi Belanja	12.338.987.269,14	11.536.294.608,00	93,49	14.075.823.855,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	(12.008.987.269,14)	(11.362.250.108,00)	94,61	(13.986.561.355,00)

5.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Dinas Perhubungan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Dinas Perhubungan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.41.292.954.456,78 atau naik sebesar Rp. 3.064.524.801 atau 10,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 38.228.429.655,78.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1 Aset

5 3.1.1 Aset Lancar

Untuk Aset Lancar Dinas Perhubungan TA.2017 sebesar Rp.11.697.108,00 dan TA.2016 sebesar Rp. 18.995.882,00 mengalami penurunan mencapai Rp. 7.298.774,00

5.3.1.1.1 Kas Dinas Perhubungan Di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk KAS Pengeluaran Dinas Perhubungan 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00,



5.3.1.1.2 Kas Di Kas Bendahara Penerimaan

Dikas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.3 Kas di Kas Bendaharan Pengeluaran

Dikas Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.4 Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Dikas Bendahara Dana Kapitasi JKN Dinas Perhubunga Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.5.915.108,00 dan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.540.232,00.

5.3.1.1.8 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Dinas Perhubungan tersebut per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.782.000,00 mengalami penurunan mencapai Rp. 6.673.650,00 dari Tahun 2016 sebesar Rp. 12.455.650,00.

No	Persediaan	31-Dec-17 Rp	31-Dec-16 Rp
1	ATK	-	827.000,00
2	Buku Uji	5.782.000,00	11.628.650,00
	Jumlah	5.782.000,00	12.455.650,00



5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Dinas Perhubungan berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Dinas Perhubungan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.41.292.954.456,78 mengalami Peningkatan nilai Rp. 3.064.524.801,78 (7,42%) dari tahun 2016 sebesar Rp. 38.228.429.655,78 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Dec-17	31-Dec-16
		Rp	Rp
1	Tanah	438.750.000,00	438.750.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.984.593.486,00	10.959.593.486,00
3	Gedung dan Bangunan	40.245.380.214,78	35.505.207.714,78
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	512.979.100,00	512.979.100,00
5	Aset Tetap Lainnya	395.994.700,00	395.994.700,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	149.650.000,00	149.650.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(11.434.393.044,00)	(9.733.745.345,00)
	Jumlah	41.292.954.456,78	38.228.429.655,78

5.3.1.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.438.750.000,00 tidak ada perubahan dari tahun tahun 2016 sebesar Rp. 438.750.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tanah untuk bangunan Gedung	397.200.000,00	397.200.000,00
2	Tanah untuk bangunan Bukan Gedung	41.550.000	41.550.000
	Jumlah	438.750.000,00	438.750.000,00

5.3.1.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 masing masing sebesar Rp.10.984.593.486,00 dan mengalami peningkatan nilai Rp. 25.000.000,00 atau (0,23%) dari tahun 2016 sebesar Rp.10.959.593.486,00



No	Aset Tetap	2017	2016
		(Rp)	(Rp)
1	alat-Alat Besar Darat	456.700.000,00	456.700.000,00
2	Alat - alat angkutan	3.990.626.000,00	3.990.626.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.151.156.400,00	1.151.156.400,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.774.599.986,00	2.749.599.986,00
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	709.696.000,00	709.696.000,00
6	Alat Laboratorium	1.852.315.100,00	1.852.315.100,00
7	Rambu - Rambu Lalu Lintas	49.500.000,00	49.500.000,00
	JUMLAH	10.984.593.486,00	10.959.593.486,00

5.3.1.2.3 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.40.245.380.214,78 dan mengalami kenaikan nilai Rp.4.634.547.747,78 atau sebesar (13 %) dari tahun 2016 sebesar Rp.35.505.207.714,78.

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	2017	2016
		(Rp)	(Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	8.669.519.350,00	8.669.519.350,00
2	Bangunan Gedung	3.370.582.875,00	3.370.582.875,00
3	Bangunan Gedung Garasi / Pool	154.379.000,00	154.379.000,00
4	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Ban	14.130.480.035,00	9.475.757.535,00
5	Bangunan Pengujian Kelaikan	1.014.730.000,00	1.014.730.000,00
6	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	9.539.840.992,78	9.539.840.992,78
7	Rumah Negara Golongan III	-	-
8	Bangunan Bersejarah Lainnya	292.034.762,00	292.034.762,00
9	Rambu Bersuar Lalulintas Darat	1.334.220.000,00	1.334.220.000,00
10	Rambu Tidak Bersuar	1.739.593.200,00	1.654.143.200,00
	JUMLAH	40.245.380.214,78	35.505.207.714,78

5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.512.797.100,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp.512.797.100,00.

No	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2017	2016
		(Rp)	(Rp)
1	Jalan Khusus	429.689.100,00	429.689.100,00
2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Baku	9.982.000,00	9.982.000,00
3	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	63.308.000,00	63.308.000,00
	JUMLAH	512.979.100,00	512.979.100,00

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 395.994.700,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp. 395.994.700,00:



No	ASET TETAP LAINNYA	2016	2015
		(Rp)	(Rp)
1	Buku Umum	32.408.850,00	32.408.850,00
2	Barang Bercorak kebudayaan - alat kesenia	78.993.850,00	78.993.850,00
3	Alat Olah Raga Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00
4	Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai	257.092.000,00	257.092.000,00
	JUMLAH	395.994.700,00	395.994.700,00

5.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 Rp. 149.650.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp. 149.650.000,00 :

No	KONTRUKS DALAM Pengerjaan	2017	2016
		(Rp)	(Rp)
2	Kontruksi dalam pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandar	149.650.000,00	149.650.000,00
	JUMLAH	149.650.000,00	149.650.000,00

5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. (11.434.393.044,00) sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar Rp. (9.733.745.345,00) terdapat perubahan sebesar Rp. (1.700.647.699,00) dengan rincian sebagai berikut :

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	31-Des-16	31-Des-15
		(Rp)	(Rp)
1	Akumulasi penyusutan Alat-alat bantu	(291.983.335,00)	(251.097.620,00)
2	Akumulasi penyusutan Alat Angkutan darat bermotor	(2.116.366.526,00)	(1.748.028.961,00)
3	Akumulasi penyusutan Alat angkut apung bermotor	(271.770.500,00)	(215.432.500,00)
5	Akumulasi penyusutan Alat bengkel tak bermesin	(383.952.650,00)	(311.715.643,00)
6	Akumulasi penyusutan Alat-alat bantu	(734.008.333,00)	(734.008.333,00)
7	Akumulasi penyusutan Alat ukur	(285.355.183,00)	(279.893.516,00)
8	Akumulasi penyusutan Alat Kantor	(45.731.101,00)	-
9	Akumulasi penyusutan Alat rumah tangga	(1.051.318.556,00)	(931.633.065,00)
10	Akumulasi penyusutan Komputer	(749.180.209,00)	(655.760.499,00)
11	Akumulasi penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	(122.662.800,00)	(101.862.800,00)
12	Akumulasi penyusutan Alat Studio	(230.431.334,00)	(214.342.668,00)
13	Akumulasi penyusutan Alat Komunikasi	(313.468.434,00)	(247.747.500,00)
14	Akumulasi penyusutan Unit-unit Laboratorium	(702.404.595,00)	(476.095.646,00)
15	Akumulai penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi	(215.000,00)	
16	Akumulasi Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(2.646.230,00)	
17	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja	(3.395.838.714,00)	(2.912.276.324,00)
18	Akumulasi penyusutan bangunan menara	(43.867.302,00)	(28.742.238,00)
19	Akumulasi penyusutan bangunan rambu-rambu	(281.525.984,00)	(232.239.690,00)
20	Akumulasi penyusutan Jalan	(399.731.683,00)	(383.045.183,00)
21	Akumulasi penyusutan Bangunan Air Bersih/ Baku	(680.555,00)	(680.555,00)
22	Akumulasi penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(11.137.354,00)	(9.142.604,00)
22	Akumulasi penyusutan Jaringan Air Minum	(116.666,00)	-
	JUMLAH	(11.434.393.044,00)	(9.733.745.345,00)



5.3.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Dinas Perhubungan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.970.000,00 tidak mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.2.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak berwujud	2.970.000,00	2.970.000,00
4	Aset Lain-lain	0,00	0,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaanya	0,00	0,00
	Jumlah	2.970.000,00	2.970.000,00

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang jangka pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2016 Rp.823.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pembayaran 95% pengadaan dan pemasangan Traffic Light sesuai SPK no 027/1534/SPK-LLAJ/IX/2016 tgl 16 Sept 2016 dan BA pembayaran no 900/2041/BAP-LLAJ/XII/2016 tgl 21 Des 2016	0,00	732.550.000,00
2	Pembayaran 5% pengadaan dan pemasangan Traffic Light sesuai SPK no 027/1534/SPK-LLAJ/IX/2016 tgl 16 Sept 2016 dan BA pembayaran no 900/2051/BAP-LLAJ/XII/2016 tgl 22 Des 2016	0,00	56.350.000,00
3	Pembayaran Pengawasan Teknis pengadaan dan pemasangan Traffic Light sesuai SPK no 027/1536/SPK-LLAJ/IX/2016 tgl 16 Sept 2016 dan BA pembayaran no 900/2008/BAP-LLAJ/XII/2016 tgl 22 Des 2016	0,00	34.900.000,00
	Jumlah	0,00	823.800.000,00

5.3.2.2 Kewajiban Untuk Di konsolidasi

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.11.364.200.108,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.13.986.561.355,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	R/K PPKAD	11.364.200.108,00	13.986.561.355,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	11.364.200.108,00	13.986.561.355,00



5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 29.943.421.456,78.**

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Perhubungan dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, realisasi tahun 2017 sebesar 174.044.500,00 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 89.262,500,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 84.782.000,00 atau sebesar 48,72 % dengan rician sebagai berikut :

No.	Pendapatan Asli Daerah - LO	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	174.044.500,00	89.262.500,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	3.850.000,00	0,00
	Jumlah	174.044.500,00	89.262.500,00

5.4.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi tahun 2017 sebesar 170.194.500,00 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 89.262,500,00 atau terdapat kenaikan dari sebesar Rp. 80.932.000,00 atau sebesar 47,55 % dengan rician sebagai berikut :

No.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum - LO	5.150.000,00	14.850.000,00
2	Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban – Pick Up - LO	65.907.500,00	29.467.500,00
3	Pelayanan Tempat Khusus Parkir -LO	76.850.000,00	32.300.000,00
4	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LO	22.287.000,00	12.645.000,00
	Jumlah	170.194.500,00	89.262.500,00



5.4.1.2 Lain – Lain PAD yang Sah - LO

Lain – lain PAD yang Sah terealisasi tahun 2017 sebesar 3.850.000,00 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 atau terdapat kenaikan sebesar 3.850.000,00 atau sebesar 100%

No.	Lain - Lain PAD yg Sah lainnya - LO	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Lain - Lain PAD yg Sah lainnya - LO	3.850.000,00	0,00
	Jumlah	3.850.000,00	0,00

5.4.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2017 Rp.7.657.218.581,00 sedangkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.097.438.874,00 terdapat Penurunan sebesar Rp. ,00 atau sebesar 2.60% dengan rincian sebagai berikut :

5.4.2.1 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 3.796.424.478,00 sedangkan untuk Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 2.784.712.982,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.011.711.496,00 atau sebesar 36,33 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	1.000.776.700,00	1.249.905.360,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	81.389.516,00	103.758.182,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	148.425.000,00	181.985.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	19.260.000,00	23.575.000,00
5	Beban Tunjangan Beras – LO	53.068.500,00	68.581.740,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.751.394,00	23.575.000,00
7	Beban Pembulatan Gaji - LO	13.368,00	19.937,00
8	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	149.298.000,00	214.068.000,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	649.000.000,00	816.910.000,00
10	Honorarium PNS Lainnya	1.693.442.000,00	890.396.763,00
11	Beban Uang Lembur PNS - LO	29.937.0001.000	111.938.000
	Jumlah	3.796.424.478,00	2.784.712.982,00



5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.160.146.404,00 untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 5.888.583.477,00 terdapat Penurunan sebesar Rp. (3.728.437.073,00) atau sebesar 63,32 % dengan rincian sebagai berikut :

N0	Jenis Beban Barang dan Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	98.932.569,00	161.250.100,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	19.107.389,00	26.775.000,00
3	Beban Persediaan Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	8.247.000,00	19.800.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	63.944.725,00	45.593.000,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	195.660.000,00	290.990.000,00
6	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	7.479.700,00
7	Beban Persediaan Bahan Kimia	-	2.400.000,00
8	Beban Persedian Patok	-	14.800.000,00
9	Beban Persediaan Telpo	240.960,00	-
10	Beban Persediaan Air	-	-
11	Beban Persediaan Listrik	80.118.775,00	45.818.308,00
12	Beban Persediaan Surat Kabar/ Majalah	45.585.995,00	38.685.000,00
13	Beban Persediaan Kawat/Faksimile/Internet	20.137.200,00	95.837.640,00
14	Beban Jasa Service	20.570.551,00	59.742.816,00
15	Beban Penggantian Suku Cadang	76.201.126,00	135.241.150,00
16	Beban Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas	-	127.466.000,00
17	Beban Persediaan Pajak Kendaraan Bermotor	19.192.300,00	9.576.989,00
18	Beban Cetak	44.439.000,00	90.221.100,00
19	Beban Penggandaan	47.209.625,00	68.389.900,00
20	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.990.000,00	11.950.000,00
21	Beban Makanan dan Minuman Tamu	65.490.500,00	123.069.000,00
24	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	173.349.000,00
25	Beban Pakaian Kerja Lapangan	-	43.500.000,00
26	Beban Pakaian Olahraga	-	73.563.000,00
29	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	411.290.000,00	774.165.000,00
30	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	735.116.466,00	1.230.060.774,00
31	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.522.223,00	134.155.000,00
32	Beban Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	17.950.000,00	9.180.000,00
35	Beban Pemeliharaan Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	24.200.000,00	25.000.000,00
36	Beban Sosialisasi	-	50.385.000,00
37	Beban Bimbingan Teknis	30.000.000,00	91.600.000,00
38	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	-	110.820.000,00
39	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	-	174.300.000,00
40	Beban Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap - LO	-	1.623.420.000,00
41	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat selain Hibah/ Bansos	-	-
	Jumlah	2.160.146.404,00	5.888.583.477,00

5.4.2.3 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban belanja hibah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 187.300.000,00



5.4.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2016 Rp.2.020.252.233,00 dan untuk 2015 sebesar Rp. 1.511.888.814,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 508.3636.419,00 atau sebesar 33,91% dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2017 (RP)	2016 (RP)
1	Beban Penyusutan Alat - alat Bantu	40.885.715,00	43.802.382,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	368.337.565,00	340.018.937,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	56.338.000,00	56.338.000,00
4	Beban Penyusutan Bengkel Bermesin	-	-
5	Beban Penyusutan Bengkel tak Bermesin	72.237.007,00	89.076.280,00
6	Beban Penyusutan Alat Ukur	5.461.667,00	8.680.000,00
7	Beban Penyusutan Alat Kantor	45.731.101,00	45.731.101,00
8	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	119.685.491,00	119.685.491,00
9	Beban Penyusutan Komputer	93.419.710,00	104.760.995,00
10	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.800.000,00	20.800.000,00
11	Beban Penyusutan Alat Studio	16.088.666,00	37.351.000,00
12	Beban Penyusutan Komunikasi	65.720.934,00	77.142.004,00
13	Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	226.308.949,00	226.926.546,00
14	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	215.000,00	-
15	Beban Penyusutan Laboratorium Hidrodinamika	2.646.230,00	-
16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	483.562.390,00	451.266.351,00
17	Beban Penyusutan Bangunan Menara	15.125.064,00	15.125.064,00
18	Beban Penyusutan Bangunan Rambu rambu	49.286.294,00	49.286.294,00
19	Beban Penyusutan Jalan	16.686.500,00	27.637.504,00
20	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/ Baku	-	116.666,00
21	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.994.750,00	1.994.750,00
22	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	116.666,00	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
	Jumlah	1.700.647.699,00	1.715.739.365,00

5.4.2.5 Beban Lain- lain

Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017 Untuk total saldo Beban Lain – lain 2017 Rp. 0,00 dan untuk 2016 sebesar Rp. 521.103.050,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 521.103.050,00 atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :



No	Beban Lain - lain	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Lain - lain	-	521.103.050,00
	Jumlah	-	521.103.050,00

Dari realisasi beban operasional tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Surplus / Defisit / LO tahun 2017 sebesar (Rp. 7.483.174.081,00) terdapat penurunan sebesar (Rp. 3.572.980.057,00) atau sebesar 32,32 % dari tahun 2016 sebesar (Rp. 11.056.154.138,00)

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp. **37.426.595.537,78**.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2017 Dinas Perhubungan sebesar (Rp.7.483.174.081,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat koreksi ekuitas Nilai Persediaan dengan saldo Rp. 0,00.
 - a. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp 0,00.
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **41.305.671.564,78**.



BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Februari 2018

KEPALA DINAS,

**Ir. KRISNA DEHEN, MT
NIP. 1910402 198303 1 018**



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	330.000.000,00	174.044.500,00	52,74	89.262.500,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	330.000.000,00	174.044.500,00	52,74	89.262.500,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	320.000.000,00	170.194.500,00	53,19	89.262.500,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	10.000.000,00	3.850.000,00	38,50	0,00
5	BELANJA	12.338.987.269,14	11.536.294.608,00	93,49	14.075.823.855,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.621.537.269,14	5.949.272.108,00	89,85	8.844.445.870,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.349.739.213,14	3.796.424.478,00	87,28	2.784.712.982,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.271.798.056,00	2.152.847.630,00	94,76	5.872.432.888,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	187.300.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	5.717.450.000,00	5.587.022.500,00	97,72	5.231.377.985,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	1.038.635.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.672.450.000,00	5.562.022.500,00	98,05	4.192.742.985,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.008.987.269,14)	(11.362.250.108,00)	94,61	(13.986.561.355,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.008.987.269,14)	(11.362.250.108,00)	94,61	(13.986.561.355,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS

Ir. KRISNA DEHEN, MT

NIP. 19600305 199303 1 004



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	5.915.108,00	6.540.232,00
Persediaan	5.782.000,00	12.455.650,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.697.108,00	18.995.882,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	438.750.000,00	438.750.000,00
Peralatan dan Mesin	10.984.593.486,00	10.959.593.486,00
Gedung dan Bangunan	40.243.430.214,78	35.505.207.714,78
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	512.979.100,00	512.979.100,00
Aset Tetap Lainnya	395.994.700,00	395.994.700,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	149.650.000,00	149.650.000,00
Akumulasi Penyusutan	(11.434.393.044,00)	(9.733.745.345,00)
JUMLAH ASET TETAP	41.291.004.456,78	38.228.429.655,78
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.970.000,00	2.970.000,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.970.000,00	2.970.000,00
JUMLAH ASET	41.305.671.564,78	38.250.395.537,78
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
URAIAN	2017	2016
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	823.800.000,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	11.362.250.108,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.362.250.108,00	823.800.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	11.362.250.108,00	823.800.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	29.943.421.456,78	37.426.595.537,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	41.305.671.564,78	38.250.395.537,78



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	174.044.500,00	89.262.500,00	84.782.000,00	94,98
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	174.044.500,00	89.262.500,00	84.782.000,00	94,98
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	170.194.500,00	89.262.500,00	80.932.000,00	90,67
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	7.657.218.581,00	11.097.438.874,00	(3.440.220.293,00)	(31,00)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	3.796.424.478,00	2.784.712.982,00	1.011.711.496,00	36,33
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	2.160.146.404,00	5.888.583.477,00	(3.728.437.073,00)	(63,32)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	187.300.000,00	(187.300.000,00)	(100,00)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.700.647.699,00	1.715.739.365,00	(15.091.666,00)	(0,88)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	521.103.050,00	(521.103.050,00)	(100,00)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.483.174.081,00)	(11.008.176.374,00)	3.525.002.293,00	(32,02)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	47.977.764,00	(47.977.764,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(47.977.764,00)	47.977.764,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.483.174.081,00)	(11.056.154.138,00)	3.572.980.057,00	(32,32)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.483.174.081,00)	(11.056.154.138,00)	3.572.980.057,00	(32,32)

Puruk Cahu, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS

Ir. KRISNA DEHEN, MT

NIP. 19600305 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	37.426.595.537,78	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.483.174.081,00)	(11.056.154.138,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.362.250.108,00	0,00
EKUITAS AKHIR	41.305.671.564,78	(11.056.154.138,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS

Ir. KRISNA DEHEN, MT
NIP. 19600305 199303 1 004